



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IKAN DAN HASIL
PERIKANAN IMPOR YANG MEMENUHI PERSYARATAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan indikator kinerja utama efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor Yang Memenuhi Persyaratan Karantina;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IKAN DAN HASIL PERIKANAN IMPOR YANG MEMENUHI PERSYARATAN KARANTINA.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor Yang Memenuhi Persyaratan Karantina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

Plt. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

HARI MARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN IKAN DAN HASIL PERIKANAN
IMPOR YANG MEMENUHI PERSYARATAN
KARANTINA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak globalisasi dan adanya perubahan semangat pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah mendorong terciptanya instansi pemerintahan yang lebih professional dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja birokrasi sebagai standar ukuran keberhasilan. Dalam praktiknya, kematangan instansi pemerintah dalam mengelola kinerja melalui pelaksanaan sistem tersebut berbeda-beda. Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk (1) menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil; (2) menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan/sasaran; (3) menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) yang berdampak bagi pencapaian tujuan/sasaran; dan (4) menetapkan alokasi anggaran program/kegiatan yang selaras dengan tujuan/sasaran.

Timbulnya berbagai permasalahan tersebut disebabkan karena instansi pemerintah tidak memahami dengan baik alasan keberadaannya dan kontribusinya dalam pembangunan. Selain itu, pemahaman instansi pemerintah terhadap konsep *value for money* yang menjadi nyawa bagi anggaran berbasis kinerja sangat rendah. Instansi

pemerintah terbiasa dengan paradigma penganggaran *Line Item Budgeting* yang hanya fokus membiayai input tanpa mengetahui apakah pembiayaan *input* tersebut akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang berdampak bagi pembangunan.

Salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja instansi pemerintah, dijabarkan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintahan.

Pembangunan karantina ikan merupakan bagian integral dari pembangunan Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem perkarantinaan ikan nasional yang komprehensif, prospektif, kompatibel dan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, daya saing dan kelestarian sumber daya hayati perikanan. Dalam kondisi tersebut, pembangunan karantina ikan diarahkan untuk mampu menjadi instrumen perlindungan sumber daya hayati perikanan dan mampu memberikan nilai tambah serta meningkatkan daya saing hasil perikanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan secara terarah dan berkesinambungan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dengan didukung oleh sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknik dan metoda diagnosis HPIK yang sesuai standar baik nasional maupun internasional. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan karantina ikan juga ditentukan oleh kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang kuat, serta peran aktif masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, pelaksanaan tindakan karantina untuk impor pada hakekatnya adalah tindakan penegakan hukum yang bersifat wajib (mandatory). Tindakan karantina harus diberlakukan terhadap setiap kegiatan pemasukan impor komoditas perikanan. Lebih tegasnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud penerapan hak berdaulat Negara Indonesia untuk melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari ancaman serangan masuknya hama dan penyakit ikan berbahaya dari luar negeri serta sebagai filter pertama dalam mencegah dan mengendalikan masuknya jenis ikan dilarang (jenis asing invasif),

PRG, SDG dan Agensia Hayati yang merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati perikanan Indonesia. Hak tersebut dijamin sesuai ketentuan yang ada pada perjanjian SPS, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada kaidah dan standard-standard internasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Karantina Ikan (Puskari) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan. Terkait hal tersebut, BKIPM menetapkan kebijakan pembangunan karantina ikan untuk mengoptimalkan pembinaan dan penyelenggaraan karantina ikan, salah satunya kebijakan terkait penguatan sistem perkarantinaan impor. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan kualitas dan efektifitas system pencegahan dan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina pada pemasukan ikan dan hasil perikanan impor di Indonesia dapat ditingkatkan dan lebih optimal.

Untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan, BKIPM menetapkan sasaran program salah satunya berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Impor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Syarat Mutu Dan Bebas Penyakit. Melalui IKU tersebut, diharapkan kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan impor sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan serta kemampuan dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat lebih optimal.

Salah satu realisasi dari program tersebut, ditetapkan sasaran kinerja berupa efektifitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina, sebagai salah satu ukuran kinerja Puskari dan UPT KIPM. Untuk dapat mengukur prosentase capaian sasaran kinerja dimaksud, maka disusun Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan IKU Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina baik di tingkat Pusat maupun UPT KIPM.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah terpenuhinya validitas pengukuran capaian IKU Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina di UPT KIPM oleh Tim Pusat.

BAB II

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A. Nama Indikator

Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina.

B. Makna Indikator

Pengukuran efektifitas kinerja UPT KIPM dalam pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina, khususnya terkait kegiatan pencegahan masuknya Penyakit Ikan Karantina melalui proses sertifikasi impor ikan dan hasil perikanan di tempat-tempat pemasukan sesuai ketentuan, dinyatakan dalam persen (%).

C. Alasan Pemilihan Indikator

Meningkatkan kualitas layanan sertifikasi terhadap ikan dan hasil perikanan impor yang dilakukan UPT KIPM dalam rangka mewujudkan system pencegahan masuk dan tersebarnya Penyakit Ikan Karantina di wilayah Negara Republik Indonesia serta memberikan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

D. Indikator Output

Indikator output dari IKU ini adalah presentase tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina sebesar 100% berdasarkan verifikasi kesesuaian dokumen Sertifikasi Kesehatan Ikan Impor (risiko tinggi dan risiko rendah) di yang dilakukan UPT KIPM dalam tiap bulannya.

E. Sampling Data

Sampling Data Sertifikasi Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Dilakukan UPT KIPM dilakukan berdasarkan Amos (1985) dalam Puskari (2013) dengan prevalensi 20% dan tingkat kepercayaan 95%, sesuai Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Sampling Data Sertifikasi Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Dilakukan Masing-Masing UPT KIPM

No.	Jumlah Dokumen Sertifikasi Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Diterbitkan	Jumlah Sampling (Sertifikat)
1	1 – 9	Sesuai dengan jumlah dokumen yang diterbitkan
2	≥ 10	10

F. Teknik Penghitungan

Untuk mengukur capaian IKK Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina (E) tiap bulan dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Hitung realisasi jumlah dokumen sertifikasi kesehatan ikan impor oleh UPT KIPM hasil sampling UPT KIPM (A);
- b. Hitung realisasi jumlah dokumen sertifikasi kesehatan ikan impor hasil sampling dari UPT KIPM yang diverifikasi telah memenuhi persyaratan karantina (B);
- c. Hitung prosentase jumlah dokumen sertifikasi impor yang memenuhi persyaratan karantina (E)

$$E = (B / A) \times 100\%$$

Berdasarkan teknik penghitungan diatas, rerata capaian masing-masing UPT KIPM selama periode Tri-Wulan (Pt) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Pt = \frac{(E1 + E2 + E3)}{3}$$

Keterangan:

Pt : presentase kumulatif per tri-wulan terhadap efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina berdasarkan hasil verifikasi di UPT KIPM

- E1 : presentase capaian indikator efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina di UPT KIPM bulan 1
- E2 : presentase capaian indikator efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina di UPT KIPM bulan 2
- E3 : presentase capaian indikator efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina di UPT KIPM bulan 3

Sedangkan untuk menghitung capaian indicator kinerja efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina untuk seluruh UPT KIPM per triwulan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$X = \left(\frac{Pt1 + Pt2 + Pt3 + \dots}{\text{Jumlah UPT KIPM Impor}} \right)$$

Keterangan:

- X : presentase kumulatif total terhadap efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina berdasarkan hasil verifikasi dalam 1 (satu) Tri-Wulan untuk seluruh UPT KIPM
- Pt1 : presentase kumulatif per tri-wulan terhadap efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina berdasarkan hasil verifikasi UPT KIPM 1
- Pt2 : presentase kumulatif per tri-wulan terhadap efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina berdasarkan hasil verifikasi UPT KIPM 2
- Pt3 : presentase kumulatif per tri-wulan terhadap efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina berdasarkan hasil verifikasi UPT KIPM 1
- dst....

G. Sumber Data

Sumber data sertifikasi kesehatan ikan impor UPT KIPM yang terdapat kegiatan importasi yang diunduh dari sistem informasi karantina ikan *online* melalui website (<http://rekon.bkipm.id>).

BAB III

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN

A. Pola Dasar

IKU Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina dirancang untuk meningkatkan kualitas sertifikasi ikan dan hasil perikanan impor di UPT KIPM dalam rangka mewujudkan system pencegahan masuknya Penyakit Ikan Karantina terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia serta memberikan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan.

Untuk mencapai dan mewujudkan hal tersebut, komponen data dan tahapan pada sertifikasi kesehatan ikan pada pemasukan impor (secara normal) dibedakan berdasarkan tingkat risiko pemasukannya, sebagai berikut:

1. Pemasukan Impor Media Pembawa Risiko Tinggi
 - a. Pelaporan PPK impor;
 - b. Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen;
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen;
 - d. Surat Perintah Analisis Media Pembawa HPIK;
 - e. Laporan Hasil Analisis Media Pembawa HPIK;
 - f. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan;
 - g. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina;
 - h. Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen;
 - i. Laporan Hasil Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen;
 - j. Surat Perintah Pemeriksaan Klinis;
 - k. Laporan Hasil Pemeriksaan Klinis;
 - l. Surat Perintah Pengambilan Sampel;
 - m. Laporan Hasil Pengambilan Sampel;
 - n. Surat Perintah Pemeriksaan Laboratorium;
 - o. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium;
 - p. Sertifikat Pelepasan (KI-D12);
 - q. Surat Penahanan Sementara, (apabila ada, kasuistis);

- r. Surat Penolakan, (apabila ada, kasuistis);
 - s. Surat Pemusnahan, (apabila ada, kasuistis);
 - t. PNBP; dan
 - u. Resume.
2. Pemasukan Impor Media Pembawa Risiko Rendah
- a. Pelaporan PPK impor;
 - b. Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen;
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen;
 - d. Surat Perintah Analisis Media Pembawa HPIK;
 - e. Laporan Hasil Analisis Media Pembawa HPIK;
 - f. Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen;
 - g. Laporan Hasil Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen;
 - h. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7);
 - i. Surat Penahanan Sementara, (apabila ada, kasuistis);
 - j. Surat Penolakan, (apabila ada, kasuistis);
 - k. Surat Pemusnahan (KI-D13), (apabila ada, kasuistis);
 - l. PNBP;
 - m. Resume.

Berdasarkan komponen sertifikasi kesehatan ikan impor tersebut di atas, komponen utama yang digunakan sebagai alat ukur capaian IKK Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina, untuk pemasukan media pembawa risiko tinggi adalah:

1. Data/nomor PPK impor
2. Data jenis dan jumlah media pembawa
3. Asal negara
4. Laporan Hasil Pemeriksaan HPIK, baik Klinis dan/atau Laboratoris
5. Sertifikat Pelepasan (KI-D12) yang diterbitkan
6. Surat Penahanan Sementara, Penolakan dan/atau Pemusnahan (apabila terdapat kasus)

Sedangkan untuk pemasukan media pembawa risiko rendah, komponen utama yang digunakan sebagai alat ukur capaian IKK Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina adalah:

1. Data/nomor PPK impor
2. Data jenis dan jumlah media pembawa
3. Asal negara
4. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) yang diterbitkan
5. Surat Penahanan Sementara, Penolakan dan/atau Pemusnahan (apabila ada kasus)

B. Strategi Pelaksanaan

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta penguatan system perkarantinaan impor melalui sasaran kinerja kegiatan efektifitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi impor Media Pembawa;
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia;
3. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan update metode serta ruang lingkup pengujian HPIK di UPT KIPM;
4. Penguatan kegiatan mitigasi risiko lalulintas impor Media Pembawa;
5. Peningkatan sistem surveilan HPIK impor dan pasca importasi;
6. Harmonisasi karantina ikan dengan instansi terkait;
7. Pengalokasian anggaran yang cukup;
8. Peningkatan kualitas data pelaporan;
9. Peningkatan jejaring dan kompetensi laboratorium; dan
10. Peningkatan kesadaran pelaku usaha.

7

C. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan yang mendukung sasaran strategis terselenggaranya sistem perkarantinaan ikan impor melalui IKU Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina, antara lain:

1. Penyusunan dan/atau penyempurnaan Peraturan/Pedoman/Juklak/Juknis/ SOP terkait importasi media pembawa (Pusat);
2. Pelaksanaan Bimtek pemeriksaan HPIK/analisis risiko impor (Pusat);

3. Pembinaan serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan sertifikasi karantina ikan impor (Pusat);
4. Penerapan jejaring laboratorium lintas instansi (Pusat dan UPT KIPM);
5. Penyediaan metode standar pengujian penyakit ikan karantina (Pusat dan BUSKIPM);
6. Kerjasama dengan instansi terkait (Pusat dan UPT KIPM);
7. Koordinasi dengan instansi terkait, evaluasi, dan pelaporan (Pusat dan UPT KIPM).
8. Pengadaan alat dan bahan pemeriksaan laboratorium (UPT KIPM);
9. Pembangunan gedung laboratorium (UPT KIPM);
10. Penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium (UPT KIPM).

D. Ruang Lingkup Capaian Indikator Kinerja Utama

Ruang lingkup capaian IKU Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina, meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV PERENCANAAN

Perencanaan merupakan fungsi utama dan langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga system perkarantinaan impor melalui IKU Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina dapat terselenggara dan tercapai dengan baik. Perencanaan kegiatan sertifikasi kesehatan ikan impor dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Perencanaan di tingkat Pusat (PUSKARI), meliputi:
 - a. Penyiapan anggaran;
 - b. Penyusunan TOR dan ROK;
 - c. Penetapan tim penyusunan dan/atau penyempurnaan Peraturan/NSPK perkarantinaan ikan terkait importasi media pembawa;
 - d. Penetapan tim monitoring dan/atau evaluasi (money) sertifikasi impor media pembawa;
 - e. Penyiapan narasumber dan peserta bimtek analisis risiko impor/pemeriksaan HPIK;
 - f. Penyiapan rencana pelaksanaan koordinasi dan/atau evaluasi serta pelaporan.
2. Perencanaan di tingkat UPT KIPM, meliputi:
 - a. Penyiapan anggaran;
 - b. Penyusunan TOR dan ROK;
 - c. Penetapan jadwal petugas operasional (piket, surveilan HPIK dll);
 - d. Penyiapan alat dan bahan operasional perkarantinaan ikan;
 - e. Penyiapan pelaksanaan jejaring laboratorium;
 - f. Penyiapan tim untuk penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium;
 - g. Penyiapan rencana pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan pencapaian IKU Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina, antara lain:

1. Pelaksanaan di Pusat Karantina Ikan, meliputi:
 - a. Penyusunan Draft Peraturan/NSPK Perkarantinaan Ikan (impor);
 - b. Rapat reviu (evaluasi) capaian ikan dan hasil perikanan impor yang bebas penyakit ikan karantina;
 - c. Verifikasi, analisis dan penelusuran ketidak sesuaian terhadap tindakan karantina yang dilaksanakan UPT KIPM pada importasi media pembawa;
 - d. Rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. Pengumpulan dan pengolahan data sertifikasi impor (<http://rekon.bkipm.id/rekon/>);
 - f. Monitoring dan/atau evaluasi (monev) perkarantinaan ikan impor di UPT KIPM (secara sampling).
 - g. Penyusunan laporan kinerja IKK tri-wulanan dan tahunan.
2. Pelaksanaan di UPT KIPM, meliputi:
 - a. Peningkatan kompetensi Pejabat Karantina, khususnya yang melakukan analisis terhadap pelaporan (PPK) impor;
 - b. Penyusunan matrik target pemeriksaan HPIK pada kegiatan importasi media pembawa;
 - c. Pengadaan alat dan bahan pemeriksaan HPIK;
 - d. Revisi dokumen mutu laboratorium;
 - e. Kalibrasi peralatan laboratorium;
 - f. Sub kontrak pengujian, uji banding dan uji profisiensi;
 - g. Kerjasama pengujian penyakit ikan, penggunaan bahan dan alat laboratorium;
 - h. Rapat koordinasi operasional perkarantinaan ikan dengan instansi terkait;
 - i. Penyusunan laporan.

B. Pendanaan

Pelaksanaan IKU Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Sertifikasi kesehatan ikan dan hasil perikanan yang bebas HPIK pada kegiatan pemasukan impor ikan dan hasil perikanan dilakukan terhadap setiap pemasukan media pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui efektifitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina, Pusat Karantina Ikan melaksanakan evaluasi secara sistematis terhadap data tindakan karantina dari masing-masing UPT KIPM yang terdapat kegiatan impor media pembawa setiap bulannya. Untuk memudahkan dalam memperoleh data tindakan karantina impor, Tim Pusat melakukan pengunduhan data dari sistem informasi karantina ikan secara melalui website (<http://rekon.bkipm.id/rekon/>) dengan besaran sampling sesuai perhitungan pada Tabel 1. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai bahan laporan capaian IKK per triwulan dan bahan perbaikan pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan impor di UPT KIPM.

A. Format Pelaporan

Format data sampling efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang memenuhi persyaratan karantina pada Masing-Masing UPT KIPM sebagaimana Lampiran 1, sedangkan laporan capaian IKU Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina yang disusun per tri-wulan terdiri dari: Pendahuluan, Indikator Capaian Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Bebas Penyakit Ikan Karantina, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan dan Saran sesuai Lampiran 2.

B. Waktu Pelaporan

Laporan triwulan IKU Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina disusun selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa triwulan dan laporan lengkap kegiatan dalam 1 (satu) tahun kegiatan.

BAB VII
PENUTUP

Ukuran kinerja Puskari dan UPT KIPM ditentukan dari capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu IKK Puskari yang telah ditetapkan adalah Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina. Untuk mencapai sasaran kinerja dimaksud, maka disusunlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina, yang merupakan landasan bekerja bagi Puskari dan UPT KIPM dalam upaya memenuhi target dari indikator kinerja kegiatan tersebut.

Diharapkan dengan Petunjuk Teknis ini, Puskari dan UPT KIPM dapat bersinergi dan bekerjasama untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Plt. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

HARI MARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi

Lampiran 1. Data Sampling Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina pada Masing - Masing UPT KIPM

No	Nomor PPK	Nama Perusahaan	Jenis Media Pembawa	Jumlah (Kg/Ekor)	Negara Asal	Target HPIK (Kepmen KP)	Pemeriksaan HPIK oleh UPT KIPM	Keterangan
Prosentase Capaian Bulan....								

Lampiran 2. *Outline* Format Laporan Triwulan dan Tahunan Capaian Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Ikan dan Hasil Perikanan Impor yang Memenuhi Persyaratan Karantina

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Sasaran
- II. TOLOK UKUR KEBERHASILAN IKU EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IKAN DAN HASIL PERIKANAN IMPOR YANG MEMENUHI PERSYARATAN KARANTINA
 - A. Target Capaian
 - B. Sampling Data
 - C. Cara Penghitungan
- III. HASIL EVALUASI
- IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
 - A. Permasalahan
 - B. Upaya Pemecahan
- V. KESIMPULAN